

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2013 menunjukkan pelanggaran lalu lintas (selanjutnya disebut perkara tilang) merupakan jenis perkara pidana terbesar yang ditangani oleh pengadilan negeri. “Total jumlah perkara pidana yang ditangani seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia pada tahun 2013 adalah 3.386.149 perkara. Sebanyak 3.214.119 atau 96,40% merupakan perkara tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas. Dapat disimpulkan bahwa dari sisi jumlah, tilang merupakan perkara terbesar yang ditangani oleh pengadilan negeri”.¹ Oleh karena itu, pada perkara tilanglah interaksi antara pengadilan dan masyarakat pencari keadilan paling banyak terjadi. Bisa dibayangkan apabila setiap tahun sekitar tiga juta orang harus menempuh sidang tilang atau berinteraksi dengan pengadilan. “Berbagai persepsi berkembang tentang pengadilan yang ditemui pada sidang perkara tilang”.²

“Pelanggaran lalu lintas yang rentan terjadi di Indonesia salah satunya dikarenakan masyarakat Indonesia yang kurang mentaati peraturan lalu lintas sehingga kasus pelanggaran dan resiko kecelakaan juga masih tinggi”.³ Selain itu, banyaknya kasus pungutan liar dalam pelanggaran lalu lintas turut menyumbang persepsi yang kurang baik terhadap penegak hukum dinilai dari

¹Budi Suharyanto dkk, 2015, *Standardisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hlm. 17

²*Ibid.*, hlm. 19

³Sandy, Soewarto, Arie, “Aplikasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Berbasis Android,” *Jurnal*, Bogor: FMIPA Universitas Pakuan, hlm. 1

rasa keadilan masyarakat. Penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara normatif dilakukan dengan menghadiri sidang di pengadilan dan membayar sejumlah denda dalam nominal tertentu.

Di Indonesia pengaturan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana denda terhadap setiap pelanggaran lalu-lintas secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut. “Pidana denda adalah pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Salah satu bentuk tindak pidana yang dikenakan dengan pidana denda adalah tindak pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Delik-delik yang terdapat dalam perkara pelanggaran lalu lintas hanya bersifat ringan sehingga hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggar lalu lintas”.⁴

Namun pengaturan baru tentang mekanisme penyelesaian perkara lalu lintas yang lebih efektif membuat ketentuan baru dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Pasca keluarnya Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Elektronik, berbagai wilayah mulai memberlakukan e-Tilang secara bertahap, salah satunya adalah yang telah diberlakukan di Sukoharjo.

⁴Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafik, hlm. 24

Ketentuan e-Tilang di daerah Sukoharjo merupakan penindakan tilang memanfaatkan teknologi modern dan dilatarbelakangi dengan banyaknya pungutan liar antara oknum polisi berupa kesepakatan antara oknum polisi dengan pelanggar lalu lintas untuk menghindari tilang dengan memberikan sejumlah uang kepada petugas sering terjadi dalam penanganan pelanggaran perkara lalu lintas. Oknum polisi menilang pelanggar dan meminta pungutan sesuai kesepakatan. Hal ini semakin marak termasuk di daerah Sukoharjo. Karena itulah terhadap penanganan tilang mulai 2017 tahun ini, Polres Sukoharjo memberlakukan sistem e-Tilang, salah satunya untuk menghindari terjadinya pungutan liar tersebut.

Polres Sukoharjo memberlakukan sistem tilang aplikasi atau e-Tilang sejak 1 Maret 2017. “Berdasarkan data di Satuan Lalu Lintas Polres Sukoharjo, dalam sebulan tercatat ada 2.324 pelanggaran lalu lintas telah ditindak. Penerapan sistem e-Tilang dapat memudahkan masyarakat dalam membayar denda tanpa harus menunggu sidang di Pengadilan Negeri setempat. Setelah pelanggar diberikan nomor bukti tilang lalu dipakai untuk membayar denda ke mesin ATM terdekat. Sistem ini juga dapat mencegah adanya pungutan liar antara pelanggar lalu lintas dan petugas polisi. Ke depan sistem e-Tilang Satuan Lalu Lintas Polres Sukoharjo akan terintegrasi dengan sistem *online* lain seperti SIM *Online* dan e-Samsat. Penerapan e-Tilang masih banyak menemui kendala sebab tidak semua wilayah Sukoharjo memakai jaringan yang stabil”.⁵

⁵Merdeka.com, 11 April 2017 02:00 WIB, *Terapkan E-Tilang, 2.324 Pelanggaran Terjadi di Sukoharjo*, dalam <http://www.merdeka.com>, diunduh Kamis, 11 April 2017 pukul 20:00

“Dengan penerapan sistem e-Tilang masyarakat tidak perlu lagi datang ke pengadilan dengan jadwal yang telah ditentukan, masyarakat hanya perlu datang ke ATM atau ke Bank selanjutnya melakukan transfer ke nomor yang sudah diberikan oleh petugas yang menilang”.⁶ Sistem e-Tilang ini merupakan aturan baru dalam penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas di daerah Sukoharjo. Masih ditemukan banyak kendala dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara lalu lintas di kawasan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“Proses Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Dengan e-Tilang (Studi Kasus di Polres Sukoharjo).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan e-Tilang dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas di Sukoharjo?
2. Apa saja kendala Polres Sukoharjo dalam menerapkan sistem e-Tilang dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas di Sukoharjo?
3. Bisakah pelaksanaan e-Tilang itu memberikan rasa keadilan masyarakat?

⁶Joglosemar.com, 11 April 2017 02:00 WIB, *Sukoharjo Urutan Pertama Penindakan Tilang Elektronik*, dalam <http://www.joglosemar.com>, diunduh Kamis, 11 April 2017 pukul 21:00

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan e-Tilang dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas di Sukoharjo.
2. Untuk mendeskripsikan kendala Polres Sukoharjo dalam menerapkan sistem e-Tilang dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas di Sukoharjo.
3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan e-Tilang itu dalam hubungannya dengan rasa keadilan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

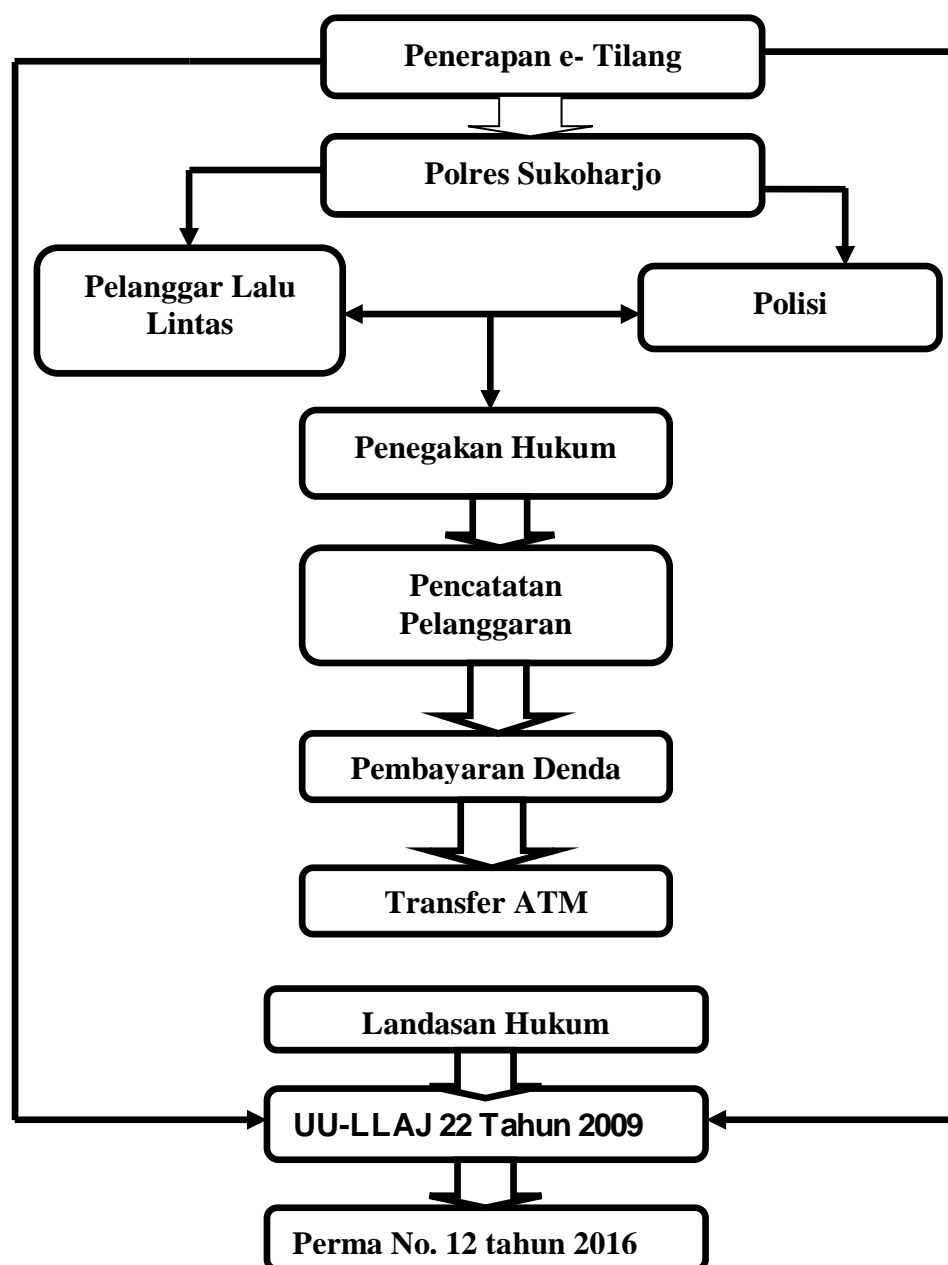
Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman hukum terhadap konsep penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan sistem elektronik sebagai langkah baru dalam aturan pidana sebagai pelaksanaan keluarnya Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Elektronik.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan wawasan hukum mengenai pelaksanaan dan penerapan e-Tilang di daerah

Sukoharjo. Diharapkan dari penelitian ini, masyarakat dapat lebih mudah dalam melakukan pembayaran denda jika terkena tindak pelanggaran lalu lintas. Sehingga kasus pungutan liar yang banyak terjadi saat terjadinya tilang dapat diatasi dengan pemanfaatan sistem elektronik.

E. Kerangka Pemikiran



“Pelanggaran lalu lintas (selanjutnya disebut tilang) merupakan fenomena sosial dan masalah hukum yang menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien agar terjadi tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum dalam implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Prosedur penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia saat ini diatur dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”.⁷

Pelanggaran lalu lintas memerlukan penegakan hukum yang efektif dikarenakan perkara pelanggaran lalu lintas yang meningkat setiap tahunnya. “Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi kembali”.⁸

Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. “Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran, yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan

⁷Budi Suharyanto dkk, *Op. Cit.*, hlm. 26

⁸Abdul Kadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 15.

hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran”.⁹

Penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tilang dihadapkan pada dua area yang dalam beberapa hal bisa saling bertentangan, yaitu efektivitas penyelenggaraan persidangan dan implementasi ketentuan formal dalam penanganan perkara tilang. Potensi pertentangan tersebut menjadi tantangan untuk merumuskan kebijakan serta instrumen hukum terhadap penyelesaian permasalahan pengelolaan perkara tilang, yang dapat mendukung efektivitas pengelolaan dengan tetap mengedepankan aspek formal sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Termasuk di sini, peraturan internal di masing-masing instansi yang berkepentingan, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

“Salah satu pendekatan teoritik yang dapat digunakan untuk mengkaji persoalan efektivitas norma hukum ialah dengan terlebih dahulu mengurainya secara konseptual. Lawrence Friedmann, dalam bukunya *Legal Theory*, menggambarkan bahwa hukum terdiri dari tiga komponen utama: substansi, struktur, dan budaya”.¹⁰ Efektivitas dari penegakan hukum dapat didekati dengan memahami dan menilai relasi antara ketiga komponen hukum tersebut.

Terkait dengan efektivitas proses penyelesaian permasalahan perkara tilang, telah terbit Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik. Penyederhanaan penyelesaian

⁹Ardi Chandra, “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dalam Menangani Razia Kendaraan Bermotor di Jalan Raya,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, (2014), hlm. 4

¹⁰Lawrence M. Friedman (Terjemahan Wishnu Basuki), *Hukum Amerika Sebuah Pengantar: 2nd Edition*, Jakarta: PT Tata Nusa , hlm.7-11.

pelanggaran lalu lintas salah satunya adalah masyarakat pelanggar lalu lintas tidak perlu hadir dalam persidangan melainkan langsung membayar denda sejumlah nominal tertentu. Penyelesaian yang berbasis elektronik atau dikenal dengan sistem e-Tilang tahun ini telah diberlakukan serentak di wilayah Sukoharjo.

“e-Tilang merupakan aplikasi *mobile* yang berfungsi untuk melakukan pembayaran denda tilang secara otomatis. Dengan sistem e-Tilang diharapkan akan menghindari kemungkinan adanya pungli berupa kesepakatan antara oknum polisi dengan pelanggar lalu lintas untuk menghindari tilang dengan memberikan sejumlah uang kepada petugas”.¹¹ Selain itu juga mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran denda dengan langsung membayar ke ATM sesuai petunjuk atau arahan petugas yang menilang.

Hal inilah yang selanjutnya akan dikaji penulis mengenai mekanisme pelaksanaan e-Tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Sukoharjo dan kendala apa saja yang ditemukan Polres Sukoharjo dalam menerapkan sistem e-Tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Sukoharjo.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum empiris yakni pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan dengan penelitian data primer di lapangan. Penelitian ini

¹¹Joglosemar.com, *Op. Cit.*

menggunakan peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dikaji penerapan atau implementasinya di lapangan, dalam hal ini terkait dengan proses penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik terhadap pelanggar lalu lintas dengan e-Tilang (Studi Kasus di Polres Sukoharjo).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. “Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak”.¹² Sehingga dapat diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti, dan jelas tentang proses penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik terhadap pelanggar lalu lintas dengan e-Tilang (Studi Kasus di Polres Sukoharjo).

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polres Sukoharjo. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data di lokasi tersebut memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Jenis Data

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

¹²Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan hasil wawancara dengan polisi atau penyidik menangani pelanggaran lalu lintas di Sukoharjo dengan e-Tilang.

b. Data Sekunder

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang dapat berupa berbagai dokumen peraturan perundang-undangan yang tertulis dalam kerangka hukum nasional di Indonesia. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Elektronik.

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua penunjang atau publikasi hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu termasuk semua dokumen yang dapat menjadi sumber informasi mengenai pidana pelanggaran lalu lintas dan penyelesaiannya.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dengan kata lain bahan hukum tambahan seperti KBBI, kamus hukum, dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu penelitian kepustakaan dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan juga dengan metode *Field Research*, yaitu penelitian lapangan, yang dilakukan melalui wawancara terhadap beberapa responden dalam hal ini polisi atau penyidik yang menangani pelanggaran lalu lintas dengan sistem e-Tilang di Polres Sukoharjo.

6. Metode Analisis Data

“Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual”.¹³ Data-data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan dianalisis secara kualitatif dan dihubungkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dari permasalahan yang ada.

¹³Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 242

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Pendahuluan, terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Tinjauan pustaka, yang di dalamnya menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang pelanggaran lalu lintas, dasar hukum pelanggaran lalu lintas, pidana denda sebagai sanksi pelanggar dan tinjauan umum tentang penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik dan e-Tilang.

Hasil penelitian dan pembahasan, yang menguraikan mengenai mekanisme pelaksanaan e-Tilang dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas di Sukoharjo, kendala Polres Sukoharjo dalam menerapkan sistem e-Tilang dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas di Sukoharjo, dan pelaksanaan e-Tilang itu dalam hubungannya dengan rasa keadilan masyarakat.

Penutup, yang menguraikan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan terkait proses penyelesaian perkara lalu lintas berbasis elektronik terhadap pelanggar lalu lintas dengan e-Tilang.